



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2024

**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
TAHUN 2025**



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2024

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga dokumen Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Tahun 2024 ini dapat disusun dan disampaikan tepat waktu. Dokumen ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam menyampaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama tahun 2024 kepada masyarakat.

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap kepala daerah berkewajiban menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada pemerintah pusat, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD, serta RLPPD kepada masyarakat. Penyampaian RLPPD ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai capaian kinerja pemerintahan daerah, termasuk pencapaian program pembangunan, pelayanan publik, serta tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan sepanjang tahun 2024.

Kami menyadari bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah masih terdapat berbagai kendala dan tantangan yang perlu menjadi perhatian bersama. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan dan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Klungkung.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran perangkat daerah, mitra kerja, serta semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penyusunan dokumen RLPPD ini. Semoga dokumen ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi masyarakat serta menjadi landasan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan transparan.

Demikian kata pengantar ini kami sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan keberkahan bagi kita semua dalam mengemban tugas dan tanggung jawab dalam membangun Kabupaten Klungkung yang lebih maju dan sejahtera.

Semarapura, 27 Maret 2025
BUPATI KLUNGKUNG
MADE SATRIA



1. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

No.	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N	Laju Kinerja
1.	Indeks Pembangunan Manusia	74,18	75,15	1,31
2.	Persentase Penduduk Miskin (%)	5,61	5,30	-5,53
3.	Persentase Pengangguran (%)	1,29	1,23	-4,65
4.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,70	(*)	-
5.	Pendapatan per Kapita (000)	11,760	12,358	5,09
6.	Ketimpangan Pendapatan/Gini Ratio	0,3380	*)	-

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Klungkung, Tahun 2024

2. CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR

Capaian kinerja urusan pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar, termasuk di antaranya:

1. Urusan Pendidikan

A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan pendidikan yang diperoleh oleh Kabupaten Klungkung pada tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun N-1 (%)	Capaian Kinerja Tahun N (%)



1.	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	89,0627877	
2.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	99,6558161	
3.	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	97,6671851	
4.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100	

Sumber: Dinas Pendidikan kabupaten Klungkung Tahun 2024

B. Realisasi Belanja Urusan Pendidikan

Realisasi belanja Urusan Pendidikan di Kabupaten Klungkung Tahun 2024 sebesar Rp. 274.390.012.628,32 atau sekitar 96,95% dari pagu belanja sebesar Rp. 283.027.880.103,00 dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut:

- 1. Memberikan Dukungan Finansial bagi Keluarga Kurang Mampu
- 2. Meningkatkan Aksesibilitas dan Pemerataan PAUD
- 3. Meningkatkan Kualitas PAUD
- 4. Program Bantuan Transportasi serta Meningkatkan Aksesibilitas Sekolah Dasar
- 5. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Sekolah
- 6. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Fasilitas Sekolah
- 7. Peningkatan Kualitas Pembelajaran di Sekolah
- 8. Penguatan Peran Guru dan Pemanfaatan Teknologi
- 9. Penyediaan Sumber Belajar Berkualitas dan Infrastruktur Pendukung
- 10. Mengatasi Dampak Learning Loss Pasca Pandemi



C. Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Pendidikan di Kabupaten Klungkung Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Angka Partisipasi PAUD yang masih rendah, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:
 - a. Faktor Ekonomi
 - b. Kurangnya Kesadaran akan Pentingnya PAUD
 - c. Aksesibilitas dan Jarak
 - d. Kualitas dan Fasilitas PAUD yang Belum Merata
2. Angka Partisipasi SD dan SMP yang tidak bisa mencapai 100%, hal ini disebabkan karena beberapa faktor antara lain:
 - a. Faktor Ekonomi
 - b. Aksesibilitas dan Infrastruktur Sekolah
 - c. Kurangnya Kesadaran dan Motivasi Bersekolah
 - d. Faktor Sosial dan Budaya
 - e. Kualitas dan Fasilitas Sekolah yang Belum Merata sehingga siswa lebih memilih untuk bersekolah di luar wilayah Kabupaten Klungkung
3. Kualitas hasil belajar siswa yang masih rendah. Skor literasi dan numerasi siswa SD dan SMP dalam Asesmen Nasional (AN) belum mencapai target yang telah ditetapkan. Berikut adalah penyebabnya:
 - a. Kualitas Pembelajaran yang Belum Optimal
 - b. Kualitas dan Kompetensi Guru yang Masih Beragam
 - c. Kurangnya Akses terhadap Sumber Belajar yang Berkualitas
 - d. Dampak Pandemi terhadap Pembelajaran
 - e. Evaluasi dan Pembelajaran yang Kurang Berorientasi pada Asesmen Nasional

4. Urusan Kesehatan

A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan kesehatan yang diperoleh oleh Kabupaten Klungkung pada tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)
1.	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	3:1000	2:1000
2.	Persentase rumah sakit rujukan tingkat	100	100



	Kabupaten/kota yang terakreditasi		
3.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100	91,41
4.	Pelayanan Kesehatan Ibu Melahirkan	100	90,83
5.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100	100
6.	Pelayanan Kesehatan Balita	100	100
7.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	100	100
8.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100	90,02
9.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lansia	100	100
10.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100	78,50
11.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100	100
12.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	100	100
13.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100	100
14.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung Tahun 2024

B. Realisasi Belanja Urusan Kesehatan

Realisasi belanja Urusan Kesehatan di Kabupaten Klungkung Tahun 2024 sebesar Rp 168.963.539.347 dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 182.972.650.914 (92,34 %) sedangkan untuk RSUD Klungkung Realisasi belanja sebesar Rp. 214.625.967.078 Dari



Pagu Anggaran sebesar Rp 208.936.708.266 (97,35 %). Dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut:

1. PSC KRIS
2. Penanggulangan Program Prioritas Hipertensi, Diabetes Militus dan Tuberkolusis.
3. Optimalisasi intervensi spesifik penurunan angka preevalensi stunting
4. Penanganan Kegawatdaruratan

C. Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Kesehatan di Kabupaten Klungkung Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Permasalahan Dinas Kesehatan:
 1. PSC KRIS belum berbentuk UPTD sehingga menyebabkan belum maksimalnya pengelolaan layanan kegawatdaruratan dan rujukan
 2. Belum terlaksananya uji kompetensi untuk nakes selain perawat dan perawat gigi krn sertifikat akreditasi ukom hanya memuat ukom untuk perawat dan perawat gigi
 3. Belum semua Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) memiliki perijinan
 4. Angka Kematian Ibu & Angka Kematian Bayi mengalami peningkatan
 5. Belum optimalnya perencanaan kehamilan dan skrining layak hamil
 6. Meningkatkan jml ibu hamil resti (Bumil Resti) yang berakibat pada kejadian komplikasi maternal neonatal
 7. Rujukan balita stunting belum maksimal
 8. Belum optimalnya pelayanan hipertensi sesuai standar
 9. Mobilisasi penduduk usia produktif yang tinggi menyebabkan susah untuk dilakukan pelayanan deteksi dini PTM
 10. Masih tingginya Insident Rate (IR) DBD di Kabupaten Klungkung
- b. Permasalahan Rumah Sakit:
 1. Keterbatasan lahan parkir di RSUD Kabupaten Klungkung bagi pegawai RSUD dan pasien/pengguna layanan RSUD;
 2. Adanya kebutuhan alat kesehatan dan penunjang layanan rumah sakit;
 3. Adanya kebutuhan jumlah & kompetensi tenaga kesehatan sesuai kebutuhan pengembangan layanan dan standar yang berlaku;
 4. Adanya kebutuhan sarana dan prasarana dalam pemanfaatan teknologi informasi pada layanan dan administrasi rumah sakit yang semakin makin dominan;
 5. Pengembangan layanan yang dibutuhkan masyarakat yang makin spesifik khususnya layanan spesialis/subspesialis, sehingga peran dokter umum makin



berkurang, *upgrade* profesi tenaga kesehatan selain kelompok medis yang juga berkembang dan perlu pendidikan strata lebih tinggi;

6. Penetapan tarif layanan yang makin sesuai dan memadai, baik untuk tarif JKN BPJS Kesehatan dan tarif pasien umum;
7. Persaingan positif antar RS/RS Swasta makin meningkat sehingga perlu strategi yang tepat sebagai RSUD Pemerintah;
8. Perlunya pemantapan manajemen struktural dan manajemen klinis agar lebih jelas dan pasti, karena sedang ada perubahan besar secara nasional seperti penyederhanaan organisasi, peralihan ke jabatan fungsional , reformasi birokrasi.

5. Urusan Pekerjaan Umum

A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan Pekerjaan Umum yang diperoleh oleh Kabupaten Klungkung pada tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut:

[illegible]



	huni bagi korban bencana kabupaten / kota & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp;		
2.	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	98,3606557	
3.	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani & nbsp; & nbsp;	0	
4.	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) & nbsp; & nbsp; & nbsp;	6,344919	
5.	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	100	

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Tahun 2024

B. Realisasi Belanja Urusan Perumahan

Realisasi belanja Urusan Perumahan di Kabupaten Klungkung Tahun 2024 sebesar Rp.620.862.748,00 dari Pagu Anggaran Rp.787.316.650,00 (78,86%) dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut:

- 1. Program Pengembangan Perumahan
- 2. Program Kawasan Permukiman
- 3. Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)

C. Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Perumahan di Kabupaten Klungkung Tahun 2024 adalah sebagai berikut:



- 1. Belum dapat merealisasikan anggar n fisik rehabilitasi rumah korban bencana karena belum adanya Surat Keputusan Penetapan Bencana oleh Kepala Daerah sehingga penanganan rumah korban bencana masih dilaksanakan oleh BPBD.
- 2. Belum bisa menuntaskan penanganan kawasan kumuh secara keseluruhan karena keterbatasan anggaran yang hanya bisa ditangani oleh Pemerintah pusat dan Pemerintah provinsi.
- 3. Pengembang perumahan belum menyerahkan aset PSU nya kepada Pemerintah daerah.

7. Urusan Trantibum Linmas

A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan Trantibum Linmas yang diperoleh oleh Kabupaten Klungkung pada tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024
1.	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	100%
2.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%	100%
3.	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	100%	100%
4.	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	100%	100%
5.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	750	840
6.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana kebakaran	750	840



7.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	528	53
8.	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%
9.	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	15 Menit	15 Menit

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klungkung Tahun 2024

B. Realisasi Belanja Urusan Trantibum Linmas

Realisasi belanja Urusan Trantibum Linmas di Kabupaten Klungkung Tahun 2024 Sebesar Rp. 4,572,462,333 dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut:

- Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum.
 - Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.
 - Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota.
- Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran.
 - Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota.

C. Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Trantibum Linmas di Kabupaten Klungkung tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- Pengumpulan Data.

Belum adanya data yang valid yang bisa dijadikan acuan pemenuhan SPM.
- Penghitungan Kebutuhan.

Perhitungan kebutuhan belum bisa dilakukan dengan baik.
- Perencanaan dan Penganggaran.

Perencanaan belum dapat mencantumkan target (100%) karena keterbatasan anggaran.
- Pelaksanaan.

Kurangnya SDM baik kualitan maupun kuantitas.



8. Urusan Sosial

A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan sosial yang diperoleh oleh Kabupaten Klungkung pada tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N
1.	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 %	64,45 %
2.	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100 %	100 %

Sumber: Dinas Sosial Kabupten Klungkung Tahun 2024

B. Realisasi Belanja Urusan Sosial

Realisasi belanja Urusan Sosial di Kabupaten Klungkung Tahun 2024 sebesar Rp.1.201.415.501 dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut:

1. Program Rehabilitasi Sosial
- Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
2. Program Penanganan Bencana
- Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

No	Jenis pelayanan dasar	Program/kegiatan/sub kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Rehabilitasi sosial dasar	Program: rehabilitasi sosial	727.871.680,00	486.193.982,00



	penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Kegiatan: rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial	727.871.680,00	486.193.982,00
		Sub kegiatan: penyediaan permakanaan	287.276.360,00	283.064.700,00
		Sub kegiatan : penyediaan alat bantu	58.804.960,00	30.296.299,00
3.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Sub kegiatan pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	204.474.072,00	59.467.684,00
4.	Rehabilitasi sosial lanjut usia terlantar di luar panti	Sub kegiatan Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	177.316.288,00	113.365.299,00
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bagi korban bencana	Program: penanganan bencana	481.419.452,00	284.591.500,00
		Kegiatan: perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota	481.419.452,00	284.591.500,00
		Sub kegiatan: penyediaan makanan	481.419.452,00	284.591.500,00

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Klungkung, Tahun 2024

C. Permasalahan Yang Dihadapi

Dalam rangka pemenuhan target standar pelayanan minimal bidang sosial terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain:

- 1. Kendaraan roda 4 (empat) untuk pengantaran gepeng dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) belum ada



- 2. Data Penyandang Disabilitas, Lansia, Anak Terlantar yg sering tercecer atau tidak terdata

Solusi yang akan dilaksanakan terkait masalah tersebut diatas adalah:

- 1. Untuk kelancaran kegiatan dalam pengantaran gepeng dan ODGJ sementara waktu kami pergunakan kendaraan roda 4 (empat) carry yang ada walaupun tidak memenuhi standar.
- 2. Melaksanakan validasi data dengan desa terkait.



HASIL EPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN SEBELUMNYA

1. Hasil EPPD Tahun Sebelumnya

a. Tahun 2021

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1109 Tahun 2023 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Secara Nasional Tahun 2022 berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2021, Kabupaten Klungkung berhasil mendapatkan hasil EPPD dengan skor kinerja **2,51** dan status kinerja **Rendah**.

b. Tahun 2022

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-6646 Tahun 2023 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Secara Nasional Tahun 2023 berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2022, Kabupaten Klungkung berhasil mendapatkan hasil EPPD dengan skor kinerja **3,1298** dan status kinerja **Sedang**.

c. Tahun 2023

Hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Klungkung untuk Tahun 2023 hingga saat ini **belum dirilis secara resmi**. Oleh karena itu, laporan ini disusun berdasarkan data dan informasi yang tersedia serta tren perkembangan indikator pemerintahan sebelumnya. Pemerintah Kabupaten Klungkung tetap berkomitmen untuk menyampaikan hasil evaluasi setelah laporan resmi diterbitkan sebagai dasar peningkatan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik di masa mendatang.

2. Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

a. Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Tahun 2022 Kabupaten Klungkung berdasarkan Resume Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern Dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 73A/LHP/XIX.DPS/05/2023 Tanggal 5 Mei 2023 dengan opini **Wajar Tanpa Pengecualian**.

b. Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Tahun 2023 Kabupaten Klungkung yang disajikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 70.B/LHP/XIX.DPS/05/2024 Tanggal 17 Mei 2024 dengan opini **Wajar Tanpa Pengecualian**.

c. Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Tahun 2024 Kabupaten Klungkung dalam proses pemeriksaan/penilaian.





RINGKASAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klungkung Tahun 2024 Realisasi Pendapatan Kabupaten Klungkung Tahun 2024 mencapai sebesar 98,15% atau terealisasi sebesar Rp 1.475.397.199.846,00. dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2024 mencapai Rp 1.459.500.695.815,15 yaitu sebesar 93,12%.

Secara rinci, rincian realisasi anggaran pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten Klungkung Tahun 2024 berdasarkan jenis pendapatan dan jenis belanja dapat dilihat dalam tabel berikut:

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Klungkung Tahun 2024

	PEMERINTAHAN KAB. KLUNGKUNG					
	LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KONSOLIDASI)					
	TAHUN ANGGARAN 2024					
	01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024					
Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023	
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6	
4	PENDAPATAN DAERAH	1.503.277.038.108,50	1.475.397.199.846,00	98,15	1.370.586.084.745,33	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	421.887.362.774,50	419.844.707.744,74	99,52	350.536.512.385,33	
4.1.01	Pajak Daerah	122.254.605.651,00	146.225.262.033,00	119,61	113.695.107.806,00	
4.1.02	Retribusi Daerah	251.048.726.542,00	255.862.677.733,24	101,92	47.649.857.636,55	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.671.274.487,00	8.671.274.486,87	100,00	7.602.949.070,93	
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	39.912.756.094,50	9.085.493.491,63	22,76	181.588.597.871,85	
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	421.887.362.774,50	419.844.707.744,74	99,52	350.536.512.385,33	
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.081.388.941.920,00	1.055.513.821.150,00	97,61	1.019.842.353.786,00	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	814.294.713.000,00	806.903.478.118,00	99,09	818.590.718.389,00	
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	267.094.228.920,00	248.610.343.032,00	93,08	201.251.635.397,00	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	733.414,00	38.670.951,26	5.272,73	207.218.574,00	
4.3.01	Pendapatan Hibah	733.414,00	37.949.626,26	5.174,38	199.960.479,00	
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Daerah	0,00	721.325,00	0,00	7.258.095,00	
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	733.414,00	38.670.951,26	5.272,73	207.218.574,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.503.277.038.108,50	1.475.397.199.846,00	98,15	1.370.586.084.745,33	
5	BELANJA DAERAH	1.567.318.080.332,00	1.459.500.695.815,15	93,12	1.355.627.177.837,47	
5.1	BELANJA OPERASI	1.230.291.594.636,00	1.144.377.695.972,62	93,02	1.043.731.802.665,44	
5.1.01	Belanja Pegawai	608.336.972.682,00	585.626.292.596,00	96,27	532.237.023.471,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	456.647.038.367,00	399.227.196.959,62	87,43	390.939.219.129,44	
5.1.03	Belanja Bunga	3.901.156.702,00	3.560.246.411,00	91,26	3.432.910.119,00	
5.1.05	Belanja Hibah	157.637.326.885,00	152.310.504.006,00	96,62	112.552.519.446,00	
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.769.100.000,00	3.653.456.000,00	96,93	4.570.130.500,00	
	JUMLAH BELANJA OPERASI	1.230.291.594.636,00	1.144.377.695.972,62	93,02	1.043.731.802.665,44	
5.2	BELANJA MODAL	127.138.663.123,00	110.769.585.761,53	87,13	186.360.556.196,77	
5.2.01	Belanja Modal Tanah	8.436.079.953,00	4.342.837.851,00	51,48	1.458.000,00	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.978.314.572,00	26.097.257.905,00	90,06	19.547.281.141,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	32.459.027.041,00	26.211.817.189,53	80,75	119.708.395.962,77	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	52.080.861.893,00	49.008.011.016,00	94,10	42.368.269.276,00	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.581.343.100,00	4.570.180.000,00	99,76	3.917.785.979,00	
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	603.036.564,00	539.481.800,00	89,46	817.365.838,00	
	JUMLAH BELANJA MODAL	127.138.663.123,00	110.769.585.761,53	87,13	186.360.556.196,77	
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	13.431.583.355,00	8.623.938.445,00	64,21	2.940.474.524,26	
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	13.431.583.355,00	8.623.938.445,00	64,21	2.940.474.524,26	
	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA	13.431.583.355,00	8.623.938.445,00	64,21	2.940.474.524,26	
5.4	BELANJA TRANSFER	196.456.239.218,00	195.729.475.636,00	99,63	122.594.344.451,00	
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	21.051.305.035,00	20.325.541.454,00	96,55	15.455.999.451,00	
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	175.404.934.183,00	175.403.934.182,00	100,00	107.138.345.000,00	
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	196.456.239.218,00	195.729.475.636,00	99,63	122.594.344.451,00	
	JUMLAH BELANJA	1.567.318.080.332,00	1.459.500.695.815,15	93,12	1.355.627.177.837,47	
	SURPLUS/DEFISIT	(64.041.042.223,50)	15.896.504.030,85	(24,82)	14.958.906.907,86	
6	PEMBIAYAAN DAERAH	64.041.042.223,50	66.293.225.136,63	103,52	55.874.539.707,64	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	70.950.446.615,50	70.951.504.950,63	100,00	55.874.539.707,64	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	70.833.446.615,50	70.834.504.950,63	100,00	55.808.039.707,64	
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	117.000.000,00	117.000.000,00	100,00	66.500.000,00	
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	70.950.446.615,50	70.951.504.950,63	100,00	55.874.539.707,64	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	6.909.404.392,00	4.658.279.814,00	67,42	0,00	
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempatnya	6.909.404.392,00	4.658.279.814,00	67,42	0,00	
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	6.909.404.392,00	4.658.279.814,00	67,42	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	64.041.042.223,50	66.293.225.136,63	103,52	55.874.539.707,64	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	82.189.729.167,48	0,00	70.833.446.615,50	

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Klungkung, Tahun 2024



INOVASI DAERAH

Berdasarkan Database Inovasi Daerah, Kabupaten Klungkung memiliki inovasi daerah sebagai berikut:

No	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan (Dasar Hukum)
1	Dinas Pertanian	Takgit Rabies	Peraturan Bupati Klungkung No. 51 tahun 2022, Tanggal 30 Desember 2022
2	Dinas Pertanian	Bang Sabit	Peraturan Bupati Klungkung No. 51 tahun 2022, Tanggal 30 Desember 2022
3	Dinas Pertanian	Wasta Mangan	Peraturan Bupati Klungkung No. 51 tahun 2022, Tanggal 30 Desember 2022
4	Dinas Pertanian	Bimajuara	Peraturan Bupati Klungkung No. 51 tahun 2022, Tanggal 30 Desember 2022
5	Dinas Pertanian	Sipadu	Keputusan Bupati Klungkung No. 373/27/HK/2024, Tanggal 21 November 2024
6	Dinas Kesehatan	Kris Klungkung	Peraturan Bupati Klungkung No. 51 tahun 2022, Tanggal 30 Desember 2022
7	Dinas Kesehatan	Sipuma	Peraturan Bupati Klungkung No. 51 tahun 2022, Tanggal 30 Desember 2022
8	Dinas Kesehatan	Ceting Dengan Jus Fe	Peraturan Bupati Klungkung No. 51 tahun 2022, Tanggal 30 Desember 2022
9	Dinas Kesehatan	Gebrak	Peraturan Bupati Klungkung No. 51 tahun 2022, Tanggal 30 Desember 2022
10	Dinas Kesehatan	Dorkesmas	Peraturan Bupati Klungkung No. 51 tahun 2022, Tanggal 30 Desember 2022
11	Dinas Kesehatan	Pandu Balita	Peraturan Bupati Klungkung No. 51 tahun 2022, Tanggal 30 Desember 2022
12	Dinas Kesehatan	Peduli Prolanis DM-HT	Peraturan Bupati Klungkung No. 51 tahun 2022, Tanggal 30 Desember 2022
13	Dinas Kesehatan	Puskesmas Tri Hita Karana	Peraturan Bupati Klungkung No. 51 tahun 2022, Tanggal 30 Desember 2022
14	Dinas Kesehatan	Tasode	Peraturan Bupati Klungkung No. 51 tahun 2022, Tanggal 30 Desember 2022
15	Dinas Kesehatan	Qr-Code Inventarisasi Barang	Peraturan Bupati Klungkung No. 51 tahun 2022, Tanggal 30 Desember 2022
16	Dinas Kesehatan	RMC Lacak;	Peraturan Bupati Klungkung No. 51 tahun 2022, Tanggal 30 Desember 2022



17	Dinas Kesehatan	Cesplong;	Peraturan Bupati Klungkung No. 51 tahun 2022, Tanggal 30 Desember 2022
18	Dinas Kesehatan	Sipekat	Keputusan Bupati Klungkung No. 462/27/HK/2023, Tanggal 28 Desember 2023
19	Dinas Kesehatan	Posyandu Sayang Jiwa	Keputusan Bupati Klungkung No. 371/27/HK/2024, Tanggal 21 November 2024
20	Badan Kesbangpol	Lokasiwa	Peraturan Bupati Klungkung No. 51 tahun 2022, Tanggal 30 Desember 2022
21	Badan Kesbangpol	Pelana	Peraturan Bupati Klungkung No. 51 tahun 2022, Tanggal 30 Desember 2022
22	Badan Kesbangpol	Instapolku	Peraturan Bupati Klungkung No. 51 tahun 2022, Tanggal 30 Desember 2022
23	Badan Kesbangpol	Anti Pusing	Peraturan Bupati Klungkung No. 51 tahun 2022, Tanggal 30 Desember 2022
24	Diskominfo	Siada	Peraturan Bupati Klungkung No. 51 tahun 2022, Tanggal 30 Desember 2022
25	Diskominfo	Klungkung Mesadu	Peraturan Bupati Klungkung No. 51 tahun 2022, Tanggal 30 Desember 2022
26	Diskominfo	Anti Cemas	Peraturan Bupati Klungkung No. 51 tahun 2022, Tanggal 30 Desember 2022
27	BKPSDM	Siap Gema Santi	Peraturan Bupati Klungkung No. 51 tahun 2022, Tanggal 30 Desember 2022
28	BKPSDM	Sisenso Mobile	Peraturan Bupati Klungkung No. 51 tahun 2022, Tanggal 30 Desember 2022
29	BKPSDM	e-Jasa	Peraturan Bupati Klungkung No. 51 tahun 2022, Tanggal 30 Desember 2022
30	BKPSDM	Sirenbut Manja	Keputusan Bupati Klungkung No. 449/27/HK/2023, Tanggal 28 Desember 2023
31	DLHP	Luh Tri Syantik	Peraturan Bupati Klungkung No. 51 tahun 2022, Tanggal 30 Desember 2022
32	DLHP	Bang Daus	Peraturan Bupati Klungkung No. 51 tahun 2022, Tanggal 30 Desember 2022
33	DLHP	Pil Sadar	Peraturan Bupati Klungkung No. 51 tahun 2022, Tanggal 30 Desember 2022
34	DLHP	Gema Tansaplas	Peraturan Bupati Klungkung No. 51 tahun 2022, Tanggal 30 Desember 2022
35	DLHP	Paras Cantik	Peraturan Bupati Klungkung No. 51 tahun 2022, Tanggal 30 Desember 2022



36	DLHP	Toss Terpusat	Peraturan Bupati Klungkung No. 51 tahun 2022, Tanggal 30 Desember 2022
37	DLHP	Gema Pedang	Peraturan Bupati Klungkung No. 51 tahun 2022, Tanggal 30 Desember 2022
38	DLHP	Pengaduan Pencemaran Ruang Terbuka	Peraturan Bupati Klungkung No. 51 tahun 2022, Tanggal 30 Desember 2022
39	DLHP	POKOK	Keputusan Bupati Klungkung No. 457/27/HK/2023, Tanggal 28 Desember 2023
40	Disarpus	Gema Arca	Peraturan Bupati Klungkung No. 51 tahun 2022, Tanggal 30 Desember 2022
41	Disarpus	Sipuspa	Peraturan Bupati Klungkung No. 51 tahun 2022, Tanggal 30 Desember 2022
42	Dinas Perhubungan	Angkutan Siswa Gratis	Peraturan Bupati Klungkung No. 51 tahun 2022, Tanggal 30 Desember 2022
43	Dinas Perhubungan	Silaju	Keputusan Bupati Klungkung No. 464/27/HK/2023, Tanggal 28 Desember 2023
44	Disdukcapil	Pitrabakti	Peraturan Bupati Klungkung No. 51 tahun 2022, Tanggal 30 Desember 2022
45	DPMPTSP	I-Growth	Keputusan Bupati Klungkung No. 373/27/HK/2024, Tanggal 21 November 2024
46	Disdikpora	AKTA	Keputusan Bupati Klungkung No. 450/27/HK/2023, Tanggal 28 Desember 2023
47	Disdikpora	GRADASI	Keputusan Bupati Klungkung No. 452/27/HK/2023, Tanggal 28 Desember 2023
48	Disdikpora	Kopi Pajar	Keputusan Bupati Klungkung No. 454/27/HK/2023, Tanggal 28 Desember 2023
49	Disdikpora	Media Pembelajaran berbasis Live Worksheet	Keputusan Bupati Klungkung No. 455/27/HK/2023, Tanggal 28 Desember 2023
50	Disdikpora	Pos Ruko on-Off	Keputusan Bupati Klungkung No. 457/27/HK/2023, Tanggal 28 Desember 2023
51	Disdikpora	Simpel	Keputusan Bupati Klungkung No. 461/27/HK/2023, Tanggal 28 Desember 2023



52	DPMDPPKB	Dikecap Cening	Keputusan Bupati Klungkung No. 451/27/HK/2023, Tanggal 28 Desember 2023
53	DKPP	Pelestarian Kearifan Lokal Garam Kusamba	Peraturan Bupati Klungkung No. 51 tahun 2022, Tanggal 30 Desember 2022
54	DKUKMPP	Pan Putu Lagas	Peraturan Bupati Klungkung No. 51 tahun 2022, Tanggal 30 Desember 2022
55	DKUKMPP	Lakon Koperasi	Keputusan Bupati Klungkung No. 374/27/HK/2024, Tanggal 21 November 2024
56	DKUKMPP	Cerdas Rekomendasi BBM Solar	Keputusan Bupati Klungkung No. 363/27/HK/2024, Tanggal 21 November 2024
57	DKUKMPP	Sinergi PLUT	Keputusan Bupati Klungkung No. 376/27/HK/2024, Tanggal 21 November 2024
58	DKUKMPP	Pelayan Sakti	Keputusan Bupati Klungkung No. 375/27/HK/2024, Tanggal 21 November 2024
59	BRIDA	Kluster Produk Unggulan Daerah Kelapa	Peraturan Bupati Klungkung No. 51 tahun 2022, Tanggal 30 Desember 2022
60	BRIDA	Kluster Produk Unggulan Daerah Mangga	Peraturan Bupati Klungkung No. 51 tahun 2022, Tanggal 30 Desember 2022
61	BRIDA	Kluster Produk Unggulan Daerah Singkong	Peraturan Bupati Klungkung No. 51 tahun 2022, Tanggal 30 Desember 2022
62	BRIDA	Kluster Produk Unggulan Daerah Rumput Laut	Peraturan Bupati Klungkung No. 51 tahun 2022, Tanggal 30 Desember 2022
63	BRIDA	e-Klinik Inovasi Daerah	Peraturan Bupati Klungkung No. 51 tahun 2022, Tanggal 30 Desember 2022
64	BRIDA	Siasik	Peraturan Bupati Klungkung No. 51 tahun 2022, Tanggal 30 Desember 2022
65	BRIDA	e-Jurnal Inovasi Daerah;	Peraturan Bupati Klungkung No. 51 tahun 2022, Tanggal 30 Desember 2022
66	BRIDA	Lokasanti	Keputusan Bupati Klungkung No. 456/27/HK/2023, Tanggal 28 Desember 2023
67	BRIDA	Jaring Kail Pari Hijau	Keputusan Bupati Klungkung No. 365/27/HK/2024, Tanggal 21 November 2024
68	BRIDA	SIHAKI	Keputusan Bupati Klungkung No. 363/27/HK/2024, Tanggal 20 November 2024



69	BRIDA	SADAR INDAH	Keputusan Bupati Klungkung No. 364/27/HK/2024, Tanggal 21 November 2024
70	BAPPEDA	Sirenbangda	Peraturan Bupati Klungkung No. 51 tahun 2022, Tanggal 30 Desember 2022
71	Disnaker	Ayo Kerja	Keputusan Bupati Klungkung No. 350/27/HK/2024, Tanggal 20 November 2024
72	Disnaker	Bantu Difabel	Keputusan Bupati Klungkung No. 349/27/HK/2024, Tanggal 20 November 2024
73	Dinas Pariwisata	Adung	Peraturan Bupati Klungkung No. 51 tahun 2022, Tanggal 30 Desember 2022
74	Dinas Pariwisata	Pengelolaan Desa Wisata Bakas	Peraturan Bupati Klungkung No. 51 tahun 2022, Tanggal 30 Desember 2022
75	Dinas Pariwisata	Klungkung Creative Hub	Keputusan Bupati Klungkung No. 453/27/HK/2023, Tanggal 28 Desember 2023
76	Sekretariat Daerah	Pasar Tani	Peraturan Bupati Klungkung No. 51 tahun 2022, Tanggal 30 Desember 2022
77	Sekretariat Daerah	Bedah Desa	Peraturan Bupati Klungkung No. 51 tahun 2022, Tanggal 30 Desember 2022
78	Sekretariat Daerah	Temu Wirasa	Peraturan Bupati Klungkung No. 51 tahun 2022, Tanggal 30 Desember 2022
79	Sekretariat Daerah	Simfoni Kesada	Keputusan Bupati Klungkung No. 460/27/HK/2023, Tanggal 28 Desember 2023
80	Sekretariat Daerah	Sipirang	Keputusan Bupati Klungkung No. 463/27/HK/2023, Tanggal 28 Desember 2023
81	RSUD Klungkung	Pitra Jagra	Peraturan Bupati Klungkung No. 51 tahun 2022, Tanggal 30 Desember 2022
82	RSUD Klungkung	Geni Yasanda	Peraturan Bupati Klungkung No. 51 tahun 2022, Tanggal 30 Desember 2022
83	RSUD Klungkung	Yantri Kuat	Peraturan Bupati Klungkung No. 51 tahun 2022, Tanggal 30 Desember 2022
84	RSUD Klungkung	RME dan SIM-ONTA	Keputusan Bupati Klungkung No. 459/27/HK/2023, Tanggal 28 Desember 2023
85	RSUD Klungkung	Dorama	Keputusan Bupati Klungkung No. 361/27/HK/2024, Tanggal 20 November 2024



86	Satpol PP - Damkar	Sepedaku	Keputusan Bupati Klungkung No. 357/27/HK/2024, Tanggal 20 November 2024
87	Satpol PP - Damkar	Simdamkartrantibumlinmas	Keputusan Bupati Klungkung No. 356/27/HK/2024, Tanggal 20 November 2024

Sumber: Badan Riser dan Inovasi Kab. Klungkung, Tahun 2024